

| PUSAT PERAWATAN PESAWAT |

BIJB-GMFI BANGUN HUB MRO KERTAJATI

Bisnis, JAKARTA — PT Bandarudara Internasional Jawa Barat mempercepat pembangunan pusat pemeliharaan dan perawatan pesawat di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat bekerja sama dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Anitana W. Puspita
anitana.widya@bisnis.com

Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Saaludin Rafi mengatakan BIJB tengah menyusun naskah kerja sama pembangunan *maintenance repair overhaul* (MRO) di bandara baru itu melibatkan anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk.

“Setelah adanya koordinasi dengan pemerintah pusat supaya GMFI [PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.] masuk juga. Alhamdulillah ini kabar baiknya ada penyelesaiannya,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (30/3).

Pada tahun lalu, dia menjelaskan BIJB telah menggelar prakualifikasi tender untuk mitra kerja sama MRO. Namun, Rafi menyatakan tender itu tak berlanjut setelah mayoritas peserta mengundurkan diri akibat pandemi Covid-19.

Pada tahap awal, dia menyatakan BIJB disiapkan menjadi pusat MRO pesawat milik pemerintah, TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dia mengatakan BIJB dan GMFI

segera menindaklanjuti agar rencana MRO bagi pesawat itu bisa terrealisasi seiring dengan penuntasan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember 2021.

Sejauh ini, Rafi melanjutkan kerja sama bisnis antara BIJB dan GMFI tinggal menentukan pendanaan dan investor. BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis, sedangkan GMFI siap mengelola dengan kemampuan SDM dan sertifikasi yang sudah dimiliki.

Selain itu, Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional, yang melayani umrah dan haji, kargo domestik dan internasional. Sembari menunggu penerbangan pulih dari pandemi, BIJB fokus mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO.

Dengan keputusan pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai hub MRO, imbuhnya, hal itu sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO.

Rafi memastikan keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB tetapi mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerja sama BIJB dan GMFI.

“MRO ini nanti *demand*-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” ujarnya.

Dia sudah memiliki dan menyiapkan lahan seluas 67 hektare. Pada pembangunan tahap I ditargetkan berdiri fasilitas di atas lahan 30 hektare. Menurut-

nya, pembangunan MRO bisa disebut dalam waktu 1 tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.

“MRO tidak rumit, *man power*-nya yang penting. GMFI sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO. BIJB menyiapkan lahan sesuai *masterplan*.”

Rafi juga memastikan BNPB akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai *homebase* pesawat pemedam kebakaran hutan kebencanaan mulai tahun ini.

Selama ini, BNPB memarkirkan pesawatnya di Subang, Malaysia. Keputusan pemerintah mendirikan MRO di Kertajati, menurutnya, membuat BNPB tidak lagi khawatir dengan urusan perawatan pesawat.

JALIN KOMUNIKASI

Sementara itu, VP Corporate Secretary and Legal PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Fajar Rian menyatakan GMFI tengah menyusun studi kelayakan atau pembangunan MRO di kawasan Bandara Kertajati, Jawa Barat.

Menurutnya, GMFI sedang menjalin komunikasi dengan *stakeholder* terkait dan menyusun studi kelayakan agar pengembangan kawasan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang disyaratkan untuk pengembangan bisnis MRO.

“Jelas kami menyambut dengan baik wacana pemerintah untuk mendukung industri perawatan pesawat udara yang akan dikembangkan di wilayah Bandara Kertajati,” kata Fajar.

PUSAT PERAWATAN

Masa depan Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat kian terang setelah pemerintah menetapkan bandara itu sebagai hub perawatan pesawat di Indonesia. Saat ini, sudah ada perusahaan asing yang berminat membangun basis perawatan pesawat di bandara itu.



Di sisi lain, dia juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi ketika menjalankan bisnis MRO. Tantangan itu antara lain penyelenggara bisnis perawatan pesawat udara tersebut harus memenuhi sertifikasinya dahulu untuk beroperasi.

Sejauh ini, GMFI sudah mengantongi sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, European Avi-

ation Safety Agency (Uni Eropa), Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Indonesia serta dari 25 negara lain.

Selain itu, GMFI juga mengantongi sertifikasi Approved Military Repair Station (AMARS) dari Kementerian Pertahanan serta dari Dinas Keselamatan dan Kerja milik TNI Angkatan Udara, seiring dengan komitmen melakukan ekspansi ke industri pertahanan. ☒

GMFI sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO. BIJB menyiapkan lahan sesuai masterplan.

www.bca.co.id



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

JADWAL DAN TATA CARA

PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") tanggal 29 Maret 2021, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai tahun buku 2020 sebesar Rp 98,- (sembilan puluh delapan rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 22 Desember 2020, sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2020 yang akan dibayarkan pada Perseroan adalah sebesar Rp432,- (empat ratus tiga puluh dua rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	31 Maret 2021
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	7 April 2021 9 April 2021
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	8 April 2021 12 April 2021
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	9 April 2021
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	28 April 2021

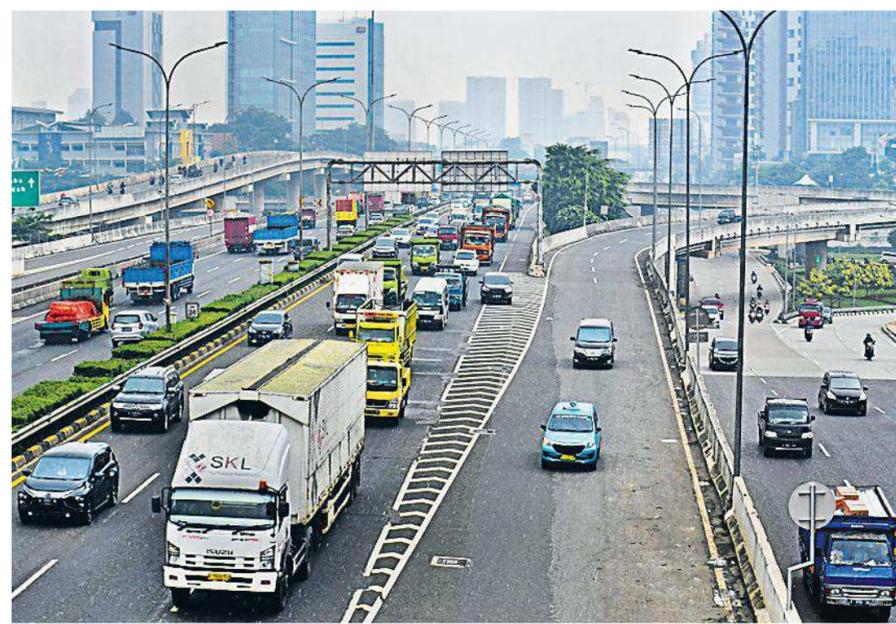
B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 April 2021 pukul 16.15 WIB (*Record Date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 28 April 2021 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (*warkat/script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Record Date*. Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham, yang menurut ketentuan perpajakan yang berlaku menjadi kewajiban pemegang saham yang bersangkutan (jika ada), dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 9 April 2021 pukul 16.15 WIB.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persewaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPH sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa *Form DGT* asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2021, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan *Form DGT* asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdapat pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPH Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
- Apabila setelah tanggal *Record Date*, terbit peraturan pelaksana baru terkait perpajakan atas dividen yang berlaku surut meliputi tanggal *Record Date* dan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen telah dilakukan sebelumnya, maka jika terdapat kelebihan pemotongan pajak penghasilan atas dividen terkait pelaksanaan peraturan pelaksana baru tersebut, penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham *warkat/script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRAR, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir 6, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 31 Maret 2021
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

PENYESUAIAN PERHITUNGAN TARIF TOL



Bisnis/Abdurachman

Kendaraan melintas

di salah satu ruas jalan tol di Jakarta, Selasa (30/3). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan penentuan tarif jalan tol kini tak bisa dihitung berdasarkan ruas jalan tol tetapi harus berdasarkan jaringan jalan tol. Berdasarkan data BPJT, jumlah transaksi harian pada 2021 diperkirakan naik sekitar 17,64% secara tahunan menjadi 4 juta transaksi, sedangkan transaksi harian pada 2020 anjlok 26,08% secara tahunan dari 4,6 juta pada 2019 menjadi 3,4 juta.

| REFOCUSING ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR |

Konstruksi 2 Kawasan Industri Tertunda

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat ratusan proyek konstruksi bakal tertunda akibat program *refocusing* anggaran salah satunya proyek konstruksi kawasan industri.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahardian mengatakan dua proyek konstruksi kawasan industri yang tertunda adalah Kawasan Industri Subang dan Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah.

Dia menjelaskan Kementerian PUPR harus menunda konstruksi kawasan industri Subang karena belum siapnya *readiness criteria* proyek tersebut. Untuk konstruksi Kawasan Industri Batang juga tidak dapat diselesaikan akhir 2021.

Readiness criteria adalah syarat bahwa infrastruktur yang dibangun tidak berakhir menjadi 'monumen'. Sejumlah kriteria *readiness criteria* tersebut antara lain ada-

nya surat peminatan, kesiapan lahan, kesiapan rencana induk dan detail, kesiapan institusi pengelola dan anggaran pengelolaan, serta kesanggupan menerima hibah.

Hedy melanjutkan Dinas Bina Marga melakukan *refocusing* anggaran sekitar Rp6,88 triliun sehingga membuat target konstruksi sepanjang 2021 terkoreksi.

"Langkah-langkah penghematan yang kami sampaikan, pertama tidak mengurangi [anggaran] belanja operasional dan kegiatan padat karya yang jadi prioritas. Kemudian menyelesaikan kegiatan-kegiatan tahun kemarin yang terkena dampak relaksasi," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Selasa (30/3).

Selain kawasan industri, Hedy melanjutkan kegiatan prioritas yang tertunda adalah pembangunan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Namun, dia

harus menunda beberapa konstruksi proyek akibat *refocusing* tersebut.

Selain itu, Hedy mengatakan pihaknya juga akan menunda kegiatan yang belum siap memenuhi *readiness criteria* dan kegiatan dengan kontrak tahun jamak.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, tahun ini ada 1.458 paket konstruksi baru senilai Rp18,35 triliun. Hingga akhir kuartal I/2021, masih ada 37 paket konstruksi yang belum dilelang dengan nilai sekitar Rp466 miliar, sedangkan jumlah paket yang sedang melalui proses lelang mencapai 336 paket senilai Rp6,32 triliun.

Dengan kata lain, Ditjen Bina Marga akan menunda kegiatan 337 konstruksi senilai Rp6,8 triliun pada tahun ini akibat dari *refocusing* anggaran 2021.

Adapun, kegiatan konstruksi yang tertunda pada tahun ini berkontribusi sekitar 17% dari total kegiatan konstruksi Ditjen Bina Marga sepanjang 2021.

Hedy menyatakan pihaknya

juga harus menunda konstruksi jalan dan jembatan di wilayah *food estate*.

Walakin, Hedy mengatakan Ditjen Bina Marga akan melanjutkan pengembangan infrastruktur di *food estate* pada 2022.

Singkat kata, *refocusing* yang terjadi pada Ditjen Bina Marga membuat target pembangunan jalan baru terkoreksi sepanjang 132 kilometer menjadi 788 kilometer.

Di samping itu, target pembangunan jembatan baru, *flyover*, maupun underpass berkurang drastis sebanyak 29.357 meter menjadi hanya 384 meter.

Untuk target lainnya tidak berubah sepanjang tahun ini.

Adapun, Ditjen Bina Marga menargetkan dapat menambah pengoperasian jalan tol sepanjang 346 kilometer, melakukan preservasi jalan sepanjang 47.17 kilometer, melakukan pemeliharaan jembatan sepanjang 510.366 meter, dan merevitalisasi drainase jalan di 33 provinsi. (Andi M. Arief)